

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP N 1 SAWOO**

SKRIPSI



OLEH :

**UMMI KHOLIFATUN QASANAH
NIM 206180060**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Kholifatun Qasanah, Ummi, 2022. *Kebijakan Pengelolaan Anggaran Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smp N 1 Sawoo.* **Skripsi.** Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag.

Kata kunci: Kebijakan, pengelolaan anggaran, mutu pendidikan

Di masa Era globalisasi ini pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan persaingan kualitas atau mutu pendidikan. Akan tetapi banyak masalah mutu yang terjadi dalam dunia pendidikan 1) Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo, 2) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo, 3) Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data tampilan data, kesimpulan, pengecekan keabsahan data menggunakan teknik trigulasi.

Hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa kepala sekolah SMP N 1 Sawoo telah melaksanakan kebijakan yang baik dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, adapun yang dapat membuktikan yaitu dalam bentuk sarana prasarana sekolah, gedung gedung sekolah yang mulai merata, infrastuktur sekolah yang mulai terpenuhi. Dalam kesimpulannya, kebijakan pengelolaan anggaran yang baik dan efektif sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

Perencanaan anggaran yang baik, pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi dari semua pihak terkait merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan anggaran di sekolah. Namun, masih terdapat kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan perhatian yang terus-menerus dalam pengelolaan anggaran di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan walaupun tidak semua masalah berkaitan dengan dana namun pendidikan yang berkualitas membutuhkan dana yang cukup banyak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ummi Kholifatun Qasanah
NIM : 206180060
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing



Mukhlisat, M.Ag.

NIP. 197311062006041017

Tanggal, 19 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri

Honorogo



Athol Fuadi, M.Pd.
NIP. 197601062006041004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ummi Kholifatun Qasanah
 NIM : 206180060
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
 Judul : Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo

telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 September 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2 Oktober 2023

Ponorogo, 13 September 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Mok Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Athok Fu'adi, M.Pd

Penguji I : Dr. Umar Sidiq, M.Ag

Penguji II : Dian Pratiwi, S.E., M.Pd.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Kholifatun Qasanah
NIM : 206180060
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023


IAIN
PONOROGO



Ummi Kholifatun Qasanah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Kholifatun Qasanah

NIM : 206180060

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Sawoo

dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ummi Kholifatun Qasanah

NIM. 206180060

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka	8
B. Kajian Teoritis	11

	8
1. Kebijakan Pendidikan.....	11
2. Pengelolaan Anggaran.....	19
3. Mutu pendidikan	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Kehadiran Peneliti.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Prosedur Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	47
1. Sejarah SMP N 1 Sawoo	47
2. Latar Geografis SMP N 1 Sawoo	48
3. Visi, Misi, dan Tujuan SMP N 1 Sawoo	49
4. Struktur Organisasi SMP N 1 Sawoo	52
5. Keadaan Guru dan Karyawan SMP N 1 Sawoo	52
6. Keadaan Peserta Didik SMP N 1 Sawoo.....	54
7. Sarana dan Prasarana SMP N 1 Sawoo	55
8. Prestasi SMP N 1 Sawoo.....	56
B. Paparan Data	58
1. Langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.....	58

2. Implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan SMP N 1 Sawoo	60
3. Implikasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.....	65
C. Pembahasan.....	67
1. Langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.....	67
2. Implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan SMP N 1 Sawoo	70
3. Implikasi penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo ...	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa Era globalisasi ini pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan persaingan kualitas atau mutu. Dalam hal ini menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sekitar pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Lukman Hakim dan Mukhtar dalam Onisimus Amtu, menuturkan mutu disebut juga kualitas, mutu atau kualitas adalah ukuran kadar, taraf atau derajat baik buruk suatu benda, berupa kecakapan, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya.¹ Dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, pemerintah merupakan satu sistem yang tidak terpisahkan antara pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya untuk memajukan pemerataan dan mutu pendidikan.²

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengejaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu

¹ Lukman Hakim dan Mukhtar, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan* (Jambi: Timur Laut Asara, 2018), 63

² Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 77

manajerial para pemimpin pendidikan, keterbatasan dana, sarana, dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Maka dari itu untuk meningkatkan mutu pendidikan butuh perencanaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah, agar pelaksanaannya dapat memuaskan dan sesuai dengan visi misi sekolah, dan juga pihak sekolah harus membentuk kelompok dalam melaksanakan sebuah program di sekolah, karena untuk meningkatkan sebuah mutu haruslah dengan kerjasama yang baik antara satu sama lain, setelah berjalannya suatu kegiatan maka seorang kepala sekolah harus melakukan evaluasi sejauh mana telah dicapai kegiatan yang direncanakan apa sudah sesuai dengan rencana awal atau belum.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana.³

Meski tidak sepenuhnya, masalah keuangan secara langsung akan mempengaruhi kualitas sekolah, terutama dari segi sarana dan prasarana

³ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 48

pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun kebutuhan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas masih membutuhkan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka urusan keuangan juga menjadi kewenangan sekolah dalam pengelolaanya secara langsung. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional, seseorang harus mampu dituntut mengelola keuangan sekolah.⁴

Besar biaya pendidikan khususnya pada tingkat satuan pendidikan terkait dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti tingkat kehadiran, angka putus sekolah, kegigihan siswa bersekolah dan keberhasilan siswa. Piet A Sahertian dan Frans Mutaher Menjelaskan bahwa: “kepala sekolah sebagai supervisor bertujuan untuk membantu memperbaiki dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya”.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus sebagai pemimpin, memantau, meningkatkan dan menciptakan pendidikan yang berkualitas, dan juga sebagai pengelolaan anggaran di lembaga pendidikan sekolah. Untuk menjadikan mutu sekolah lebih baik dari sebelumnya.

⁴ E Mulayasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2003), 193

⁵ Piet A Sahertian. Frans Mutaher, *Prinsip dan Tehnik supervisi pendidikan* (Jakarta: Reneka Cipta,1981), 23

Kebijakan selain itu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan karena kebijakan merupakan suatu bentuk dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibuat sepenuhnya secara rasional melalui optimalisasi strategi untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka usaha pencapaian tujuan secara maksimal. Kebijakan dianggap suatu posisi atau pendirian yang dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu konflik dalam rangka pencapaian tertentu. Dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari seorang kepala sekolah untuk menangani sebuah masalah seperti salah satunya tentang pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.

Kebijakan dianggap juga sebagai proses evaluasi yang dirancang untuk menemukan solusi untuk masalah yang sangat spesifik. Evaluasi tersebut mengacu pada suatu proses penyelidikan atau mencari solusi. Kebijakan tersebut didasarkan pada kombinasi akal sehat dengan spesialisasi ilmiah yang terkait dengan pengetahuan yang berhubungan dengan profesi, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu kebijakan melibatkan pemahaman (nalar) manusia dalam memecahkan permasalahan.

Dari konteks itu perlu diadakannya upaya lebih lanjut pengelolaan anggaran, anggaran menurut Henry Simamora (1999) merupakan "suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu".⁶

Sehingga dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya sekolah untuk

⁶ Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-2, Cetakan Kedua*. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN. 1999)

mencapai tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi mutu pendidikan ialah sekolah⁷,

Dapat di ketahui pengelolaan anggaran di SMP N 1 Sawoo diantaranya ialah dana BOS digunakan untuk operasional sekolah yang penggunaannya diatur oleh pemerintah, sehingga ada kekurangan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Sebagai pendamping BOS sekolah lewat Komite menggali dana berupa sumbangan sukarela bagi yang mampu, dana tersebut digunakan sebagai pendamping BOS. Selain sumbangan sukarela untuk peningkatan mutu, komite juga menggali dana sumbangan sukarela untuk fisik dana sarana lain yang diperlukan sekolah melalui Komite. Sedangkan dana BOS sendiri berarti, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOS reguler diatur dalam .⁸ berdasarkan obeservasi di SMP N 1 Sawoo peneliti melihat bahwa kinerja kepala sekolah Sawoo memiliki kinerja yang berjalan efektif dan berkopetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan hal ini dibuktikan antarlain kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru-guru yang mengajar secara menyeluruh ke semua kelas di SMP N 1 Sawoo, sistem input, proses, dan output semua berjalan dengan baik. Akan tetapi masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di SMP N 1 Sawoo seperti bangunan gedung-gedung sekolah yang masih kurang, ruang

⁷ Zamroni. *Meningkatkan Mutu Sekolah*. (Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2007), 10

⁸ <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos> (daiakses pada 23 November 2021 pukul 13.00 WIB)

perpustakaan yang menyatu dengan UKS, kamar mandi yang kurang layak, sarana prasarana yang masih belum lengkap hal tersebut dapat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait kebijakan yang diterapkan sekolah dalam pengelolaan anggaran di SMP N 1 Sawoo. Dengan alasan karena SMP N 1 Sawoo menyadari pentingnya perkembangan pengelolaan anggaran untuk mencapai keunggulan dalam mutu pendidikan. Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo”*



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo?
3. Bagaimana implikasi penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan. Fungsi kebijakan pengelolaan anggaran meliputi langkah-langkah, implementasi dan implikasi yang di kaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

E. Manfaat Penelitian

Setelah selesainya penelitian ini, beberapa manfaat yang di harapkan antra lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat mendapat khasanah keilmuan terkait dengan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan, terutama SMP N 1 Sawoo, diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepala sekolah untuk mengelola keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Bagi pneliti lain dan khasanah ilmu dihrarapkan bermanfaat sebagai informasi yang mampu menambah wawasan bagi peneliti lain dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan didukung penelitian lapangan yang telah dilakukan.
- c. Bagi peneliti diharapkan mampu bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan untuk bekal untuk terjun dilapangan pekerjaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian digunakan untuk memberikan kemudahan terhadap gambaran dan maksud pada skripsi yang dibuat. Untuk mempermudah menyusun pemahaman skripsi ini, maka dilengkapi dengan pembahasan yang sistematis, berupa:

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab yaitu, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian teori, pada bab ini di paparkan teori dijadikan landasan yang menganalisis data yang berasal dari lapangan. Teori yang di maksud meliputi kebijakan, pengelolaan anggaran dan mutu pendidikan

Bab tiga, Metode Penelitian, Metode Penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, hasil dan pembahasan, berfungsi menjelaskan hasil temuan yang ada di lapangan terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang sejarah SMP N 1 Sawoo, letak geografis, profil sekolah, visi dan misi SMP N 1 Sawoo, tenaga pendidik dan kependidikan SMP N 1 Sawoo, struktur organisasi SMP N 1 Sawoo, sarana prasarana SMP N 1 Sawoo, dan siswa SMP N 1 Sawoo, sedangkan data khusus merupak deskripsi data tentang langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo, implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo, dan implikasi penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

Bab lima, Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Ada sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis ini. Di antaranya yaitu: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Handayani, dengan judul *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah SE-Surakarta*.⁹ Hasil penelitian tersebut diantaranya menyimpulkan bahwa: Jenis penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) dengan desain penelitian campuran tidak berimbang (*concurrent embedded design*). Populasi dalam penelitian ini adalah SMA Muhammadiyah se Surakarta dan sampel yang diambil 2 (dua) sekolah yaitu SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dan SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta kajian dokumen. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah triangulasi, sedangkan teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data, perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Muhammadiyah se Surakarta telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta mencapai 90%, sedangkan di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta mencapai 80%. Hal ini dikarenakan adanya masalah keterbatasan dana yang dihadapi sekolah.

⁹ Dwi Handayani. *Analisis Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah Se-Surakarta*. (Surakarta: Skripsi. 2017)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hapidah Aini, dengan judul *Kebijakan Pengelolaan Budgeting Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MAN 5 Aceh Besar*.¹⁰ Hasil penelitian tersebut diantaranya menyimpulkan bahwa: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah MAN 5 Aceh Besar telah melaksanakan kebijakan yang baik dalam pengelolaan *budgeting* untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut, adapun yang dapat membuktikan yaitu dalam bentuk ekstrakurikuler yang telah banyak didapatkan penghargaan dari luar dalam mengikuti sebuah pertandingan oleh siswa/i MAN 5 Aceh Besar. Kendala-kendala yang dihadapi di sekolah ini dalam pengelolaan *budgeting* untuk peningkatan mutu pada saat ini adalah salah satunya kurangnya dana yang masuk ke sekolah MAN 5 Aceh Besar dan dalam pelaksanaan sering terjadi perbedaan pendapat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fakarotul Karimah, dengan judul *Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Thafidz Ash-Habul Khafi Ngawi)*.¹¹ Hasil penelitian tersebut diantaranya menyimpulkan bahwa: Dari hasil analisis data diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: Pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan (*budgeting*) merupakan proses mempersiapkan rangkaian keputusan untuk mengambil tindakan yang dijabarkan dalam konsep real untuk menjalankan kehidupan sekolah mendatang dengan pembiayaan yang terprogramkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan desain ideal, hasil perencanaan berupa efisiensi anggaran, pemaksimalan fungsi manajemen dan kebutuhan siswa terakomodir. Kedua, pelaksanaan pembiayaan pendidikan (*actuating*) sebagai proses implementasi pembiayaan pendidikan melibatkan pelaksana bertindak sesuai perencanaan dengan petunjuk teknis BOS, pentingnya orientasi dan menggerakkan operator agar visi

¹⁰ Hafidah Aini. *Kebijakan Pengelolaan Budgeting Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar*. (Aceh: Skripsi. 2018)

¹¹ Fakarotul Karimah. *Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Thafidz Ash-Habul Khafi Ngawi)*. (Ngawi: Tesis. 2018)

tercapai, dengan prosedur mengedepankan prinsip *actuating* dan kehati-hatian. *Actuating* membutuhkan pengorganisasian yang memperhatikan ketersediaan sumber daya dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada sebagai bahan pertimbangan untuk mengorganisasikan program. Ketiga, pengawasan pembiayaan pendidikan (*controlling*) berfungsi memonitoring seluruh aktifitas penggunaan pembiayaan anggaran pendidikan, mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan, kenyataannya masih terdapat pembiayaan yang tidak tercantum dalam APBM, sehingga diperlukan tambahan biaya dari sumberlain. Keempat, mutu pendidikan Islam menjadi sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena pemenuhan sarana penunjang pendidikan serta pembelajaran yanguntutannya semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam yang akhirnya menjadi perhatian bagi setiap lembaga pendidikan.

Dari deskripsi tersebut, terdapat sejumlah perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis ini, yaitu: *pertama*, pada aspek perbedaannya, (a) Posisi ketiga peneliti tersebut lebih menitikberatkan pada aspek anggaran dalam dalam perencanaan sekolah dan sumber daya ketersediaanya, (b) Ketiga penelitian tersebut lebih pada upaya ‘deskripsi’ semata sedangkan penelitian penulis ini disamping juga melakukan ‘deskripsi’ juga melakukan ‘analisis’, dalam bentuk pengelolaan dan implikasi peningkatan mutu pendidikan. *Kedua*, pada aspek persamaannya, obyek penelitian sama-sama dilakukan di lembaga pendidikan.

NO	Penelitian	Perbedaan	Persamaan
----	------------	-----------	-----------

1.	Dwi Handayani, 2017, <i>Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah SE-Surakarta.</i>	- pada penelitian yang dilakukan Dwi menjelaskan bahwa metode pengambilan data menggunakan metode kombinasi dengan desain penelitian campuran tidak berimbang (<i>cocurrent embedded design</i>).	-sama-sama memiliki adanya masalah keterbatasan dana yang dihadapi sekolah.
2.	Hapidah Aini, Analisis Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu di SMP N 1 Sawoo.	-penelitian yang dilakukan Haidah Aini, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran telah terlaksana adapun pembuktiannya yaitu dalam bentuk ekstrakurikuler yang telah banyak mendapatkan penghargaan.	-sama-sama menggunakan metode kualitatif

Fakarotul Karimah, Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Khafi Ngawi)	-penelitian yang dilakukan Fakarotul ini menggunakan metode kuantitatif.	-sama-sama menjelaskan anggaran sekolah.
---	--	--

B. Kajian Teoritis

1. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian kebijakan pendidikan

Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dalam Riant Nugroho¹², kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu

¹² Riant Nugroho. *Public Polic* (Jakarta: PT Elex Media Computido, 2008), 36.

mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.¹³ Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara dibidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan.¹⁴

b. Jenis-jenis kebijakan pendidikan

Secara tradisional, para pakar ilmu politik mengategorikan kebijakan publik ke dalam kategori: (1) kebijakan substantif (misalnya: kebijakan pendidikan, perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri, dan sebagainya), (2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen), dan (3) kebijakan menurut kurun waktu tentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru, kebijakan masa orde lama).

Menurut Anderson, dimana dia membagi beberapa jenis kebijakan tersebut, seperti sebagai berikut:

1) *Substantive Policies*

Suatu kebijakan yang menyangkut materi, isi, atau *subject matter* kebijakan, misalnya kebijakan di bidang pendidikan, perdagangan, hukum, perburuhan, pertanian, dan lain-lain.

¹³ *Ibid.*, 37.

¹⁴ Tilaar dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 264.

2) *Procedural Policies*

Yaitu kebijakan yang menyangkut siapa, kelompok mana dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

3) *Distributive policies*

Merupakan kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat.

4) *Redistributive policies*

Yaitu kebijakan yang arahnya memindahkan hak, kepemilikan, kepunyaan pada masyarakat.

5) *Regulatory policies*

Merupakan kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas datindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang.

6) *Self regulatory policies*

Kebijakan jenis ini hampir-hampir sama dengan *regulatory policies*, hanya saja *self regulatory policies* biasanya didukung oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

7) *Material policies*

Merupakan kebijakan mengenai penyediaan sumber-sumber material kepada penerimanya, dengan mengenakan beban atau kerugian kepada yang mengalokasikannya.

8) *Symbolic policies*

Kebijakan jenis ini pada umumnya tidak memaksa kepada banyak orang, karna dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat.

9) *Collection good policies*

Yaitu kebijakan tentang penyediaan barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak.

10) *Private good policies*

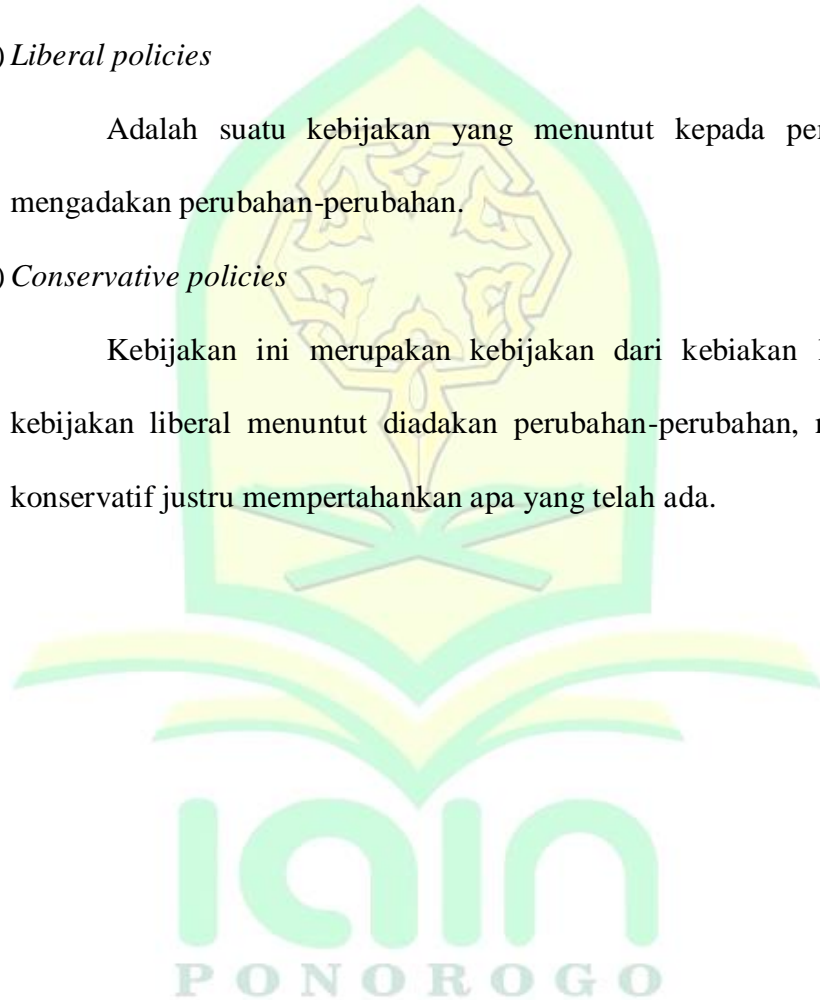
Adalah kebijakan penyediaan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi masyarakat tersebut harus menyediakan biaya untuk mendapatkan layanan.

11) *Liberal policies*

Adalah suatu kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan.

12) *Conservative policies*

Kebijakan ini merupakan kebijakan dari kebijakan liberal. Kepada kebijakan liberal menuntut diadakan perubahan-perubahan, maka kebijakan konservatif justru mempertahankan apa yang telah ada.



c. Implementasi kebijakan pendidikan

Pada cukup banyak teori yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Wahab, paling ada 3 (tiga) teori yang cukup banyak dibahas dalam kaitan ini, yaitu: Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, Van Meter dan Van Horn, serta Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

1) Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Oleh para ahli ilmu politik keduanya dikelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan “*He Top Down Approach*” menurutnya, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka dibutuhkan banyak syarat diantaranya:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang berarti.
- b) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dari sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan harus benar-benar ada atau tersedia.
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- e) Hubungan kualitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

- f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2) Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat menyampaikan enam variabel, keenam variabel tersebut meliputi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksanaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta karakter pelaksanaan. Teori yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn ini adalah teori yang berangkat dari argumen bahkan perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berbeda.

3) Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut beberapa ahli, teori yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier disebut sebagai "*a frame work for implementation analysis*" atau kerangka analisis implementasi. Kedua pelopor teori tersebut berpendapat bahwa peran penting dari kerangka analisis implementasi dari suatu kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

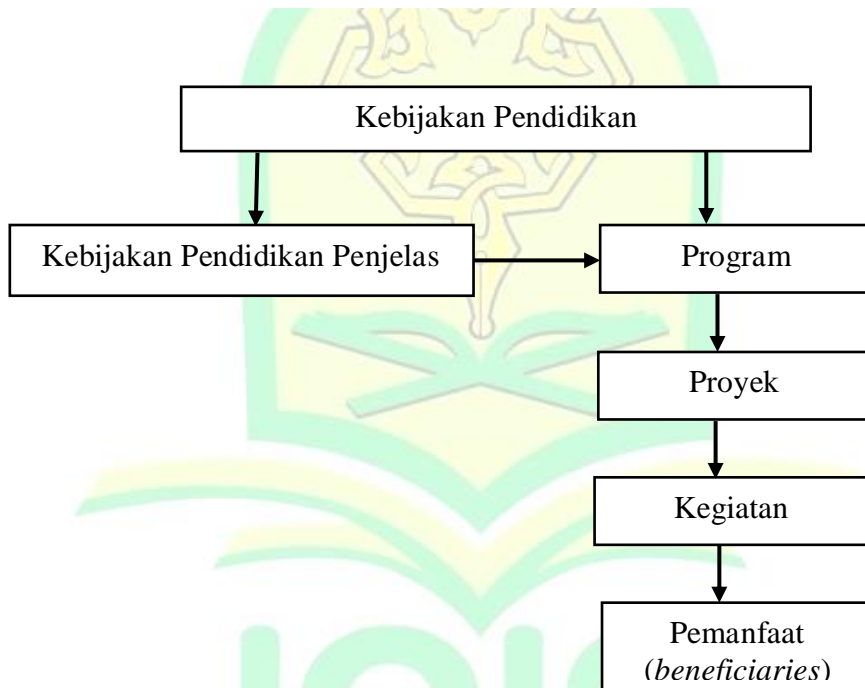
4) Teori Edward

George C. Edward III, mengemukakan empat variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposition atau sikap (*attitudes*), serta struktur birokrasi (*berreucratic structure*).

d. Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan

Langkah-langkah implementasi kebijakan, ada baiknya diketahui tata urutan implementasi kebijakan pendidikan:

Tabel 2. 1 tata urutan implementasi kebijakan pendidikan

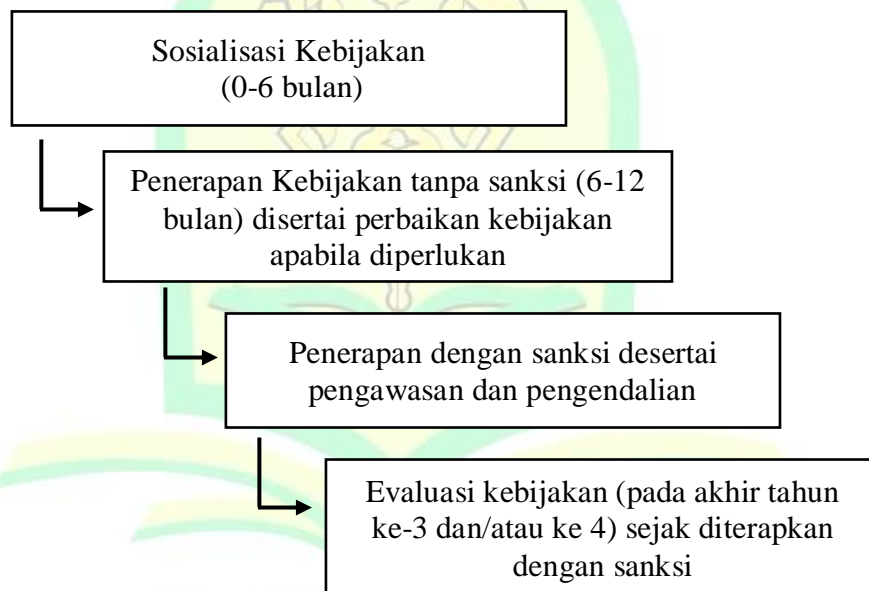


Tidak ada acuan baku tentang langkah-langkah untuk implementasi kebijakan pendidikan. Namun apabila mengikuti alur berpikir sesuai kerangka peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah

pusat dan daerah, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah seperti berikut ini:

- 1) Penyimpanan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan tersebut divisualisasikan sebagaimana tampak pada gambar berikut:

Tabel 2. 2 Langkah-langkah implementasi kebijakan Pendidikan



2. Pengelolaan Anggaran`

a. Pengertian Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai macam pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Halim dan Kusufi, Pengelola dan tanggung jawab keuangan daerah ditinjau dari sisi keilmuan ekonomi dan manajemen disebut sebagai manajemen keuangan publik (*public finance or public financial management*). Berdasarkan *literature* tentang *public financial management*, masalah utama dalam pengelolaan keuangan mencakup masalah, antara lain: akuntansi, anggaran, pengendalian atau pengadaan, dan audit atau pemeriksaan. Keempat masalah utama tersebut bila dikelola dengan baik maka akan dicapai suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih populer dengan istilah sistem pengelolaan keuangan publik atau pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Budgeting diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti anggaran atau penganggaran, menurut KBBI anggaran adalah perkiraan, perhitungan, aturan, taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang, rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang.

Anggaran menurut Henry Simamora merupakan "suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu". Sehingga dapat dinyatakan bahwa

anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.¹⁵

Ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai anggaran menurut para ahli,

- 1) Anthony dan Govindarajan, mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian.¹⁶
- 2) Hansen dan Mowen, anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional.¹⁷
- 3) Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.
- 4) Munandar, mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.¹⁸
- 5) Supriyono, penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek

¹⁵ Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-2, Cetakan Kedua*. (Yogyakarta: Penerbitan STIE YKPN. 1999)

¹⁶ Anthony, R., Vijay Govindarajan. *Management Control System, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista*. (Jakarta: Salemba Empat. 2005)

¹⁷ Hansen dan Mowen. *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. (Salemba Empat: Jakarta. 2004)

¹⁸ Munandar. *Budgeting, Edisi Pertama, Cetakan Ke- 14*. (Yogyakarta: BPF. 2000)

yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program.¹⁹

b. Tujuan anggaran

Tujuan anggaran menurut para ahli diantaranya ialah Menurut Sasongko dan Parulian, tujuan penyusunan anggaran ialah :

- 1) Perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
- 2) Koordinasi anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan.
- 3) Motivasi anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
- 4) Pengendalian keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- 2) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

¹⁹ Supriyono, R.A. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan, Edisi 2 Buku 2*. (Yogyakarta: BPFE. 1990)

- 4) Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.²⁰

c. Jenis dan sumber anggaran

1) Secara umum jenis anggaran terbagi menjadi:

- a) Anggaran langsung (*direct cost*). Adalah anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, gaji guru baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa.
- b) Anggaran tidak langsung (*indirect cost*). Adalah keuntungan yang hilang dalam bentuk anggaran kesempatan yang hilang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
- c) Anggaran publik (*social cost*). Adalah sejumlah anggaran sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat
- d) *Private cost*. Adalah anggaran yang di keluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya.

2) Sumber anggaran sekolah

Dalam UUSPN yang diresmikan pada tahun 2003 pasal 46 ayat 1 yang berbunyi “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur dan memutuskan bahwa anggaran pendidikan bersumber dari pemerintah selaku penanggung jawab pendidikan nasional, pemerintah daerah selaku penanggung jawab pendidikan tersebut. Sumber anggaran pada suatu sekolah secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi:

²⁰ Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1.* (Jakarta: Salemba Empat. 2013)

- a) Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)
- b) Orang tua siswa
- c) Masyarakat
- d) perusahaan, dll.

d. Strategi pengelola anggaran

Beberapa ahli anggaran pendidikan menekankan bahwa ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan berbagai kegiatan pendidikan. Unsur-unsur administrasi pendidikan yang lainnya seperti manusia atau personil, fasilitas, teknologi pendidikan, dana berfungsi untuk kemudian menghasilkan *output* tertentu yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan beberapa jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan, perlu pula dipikirkan dari mana dana itu diperoleh. Pengelolaan anggaran pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan dana, baik anggaran operasional maupun anggaran kapital, disertai bukti-bukti administratif dan fisik sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

e. Implementasi pengelolaan anggaran

Pada dasarnya penganggaran adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk mengatur penggunaan sumber dana yang ada di sekolah

- 1) Penetapan kegiatan
- 2) alokasi anggaran
- 3) Penentuan dan pemeliharaan sumber dana
- 4) Pelaksanaan anggaran pendidikan

- 5) Prioritas anggaran pendidikan
- 6) Asas efektivitas dan efisiensi
- 7) Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan

3. Mutu pendidikan

a. Pengertian Mutu Menurut Para Ahli

Mutu memiliki pengertian yang beragam dan memiliki implikasi yang berbeda jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada barang apa yang dihasilkan, dipakai dan anggapan orang.

- 1) Menurut Gaspersz (2002), menjelaskan bahwa mutu memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, dari konvensional hingga modern. Definisi konvensional mendefinisikan karakteristik langsung dari suatu produk, sedangkan definisi modern menjelaskan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Namun konsep dasar mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada proses yang sempurna.
- 2) Menurut Arcaro (2006), mutu adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah.
- 3) Menurut Juran, mutu diartikan sebagai kesesuaian penggunaan atau tepat untuk pakai. Pendekatannya adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, dengan beberapa pandangannya: (1) meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir; (2) perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan; (3) mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan

administrative; (4) prasyarat mutu adalah adanya pelatihan seluruh warga sekolah.²¹

- 4) Menurut Hoy C. Mutu (kualitas) dapat dilihat pada saat masyarakat yang berorientasi sebagai konsumen melakukan dengan memenuhi harapan konsumen. 'Mutu', 'nilai' dan 'pilihan' adalah bagian dari dogma konsumtif dalam kaitannya dengan barang dan jasa.
- 5) Menurut Crosby, mutu yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandartkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila memiliki standart kualitas yang telah ditentukan.²²
- 6) Edwards Deming merupakan tokoh mutu yang lahir pada 14 Oktober 1900. Deming mengemukakan 14 langkah tentang penerapan mutu. Empat belas poin yang dirumuskan oleh Deming yaitu: 1) ciptakan usaha peningkatan produk dan jasa; 2) adopsi falsafah baru; 3) hindari ketergantungan pada inspeksi massa untuk mencapai mutu; 4) akhiri praktik menghargai bisnis dengan harga; 5) tingkatkan secara konstan sistem produksi dan jasa; 6) lembagakan pelatihan kerja; 7) lembagakan kepemimpinan; 8) hilangkan rasa takut; 9) uraikan kendala-kendala antar departemen; 10) hapuskan slogan, desakan, dan target, serta tingkatkan produktivitas; 11) hapuskan kuota kerja yang menggunakan kuota numerik; 12) hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas keahliannya, 13) lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat dan peningkatan kualitas kerja, dan 14) tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan transformasi.

²¹ Nur Zazin. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 54-55

²² Onisimus Amtu. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah konsep, strategi dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 118.

Dalam lembaga pendidikan Islam, konsep Deming ini dapat diterapkan. Sekolah senantiasa meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kemajuan dan capaian baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa diadopsi oleh sekolah. Sekolah tidak boleh terlambat mengikuti perkembangan teknologi dan sebisa mungkin mampu menciptakan inovasi baru. Keberhasilan yang dicapai oleh sivitas sekolah tidak harus dihargai dengan uang, tetapi bisa berupa penghargaan lainnya. Pelatihan dan kepemimpinan dikelola dengan baik, iklim organisasi dibuat sekondusif mungkin sehingga tidak ada sivitas sekolah yang takut untuk menyuarakan pendapatnya. Pererat hubungan antar departemen atau bagian yang ada di sekolah serta tempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

Pengertian Mutu Pendidikan Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Depdiknas, 2011).

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Input-input harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan

input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.²³

Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa diselesaikan secara cepat dan harus melalui perencanaan dan proses yang bermutu. Input dari lembaga pendidikan harus bermutu dan diproses dengan kegiatan belajar mengajar yang bermutu sehingga menghasilkan output yang bermutu. Selain itu, peranan kepala sekolah sangat besar dalam mencapai mutu ini. Wahyudi mengemukakan bahwa kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendayagunakan tenaga kependidikan melalui kerjasama yang kooperatif.²⁴

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input. Sedang dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasikan dan penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, serta mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable*

²³ Mulyasa. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 157

²⁴ Hardianto. *Penerapan Manajemen Mutu Terpadu pada Lembaga Pendidikan Islam, Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016), 168

learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan mampu benar-benar memberdayakan peserta didik.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efensiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik; dan (2) prestasi non akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan kejuruan, dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.²⁵

Dalam konteks pendidikan, sekolah yang bermutu dapat dilihat dari spesifikasinya yang berarti standarisasi yang ada. Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang telah memenuhi atau diatas standar minimal, baik standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kurikulum dan sebagainya. Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang menghasilkan alumni atau peserta didik yang sesuai dengan harapan pelanggan, seperti bisa mengisi peluang dunia kerja, memiliki sikap yang sesuai dengan masyarakat serta berkontribusi aktif terhadap kemajuan masyarakat, daerah

²⁵ Mulyasa. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 158.

ataupun bangsa dan negara. Sekolah yang bermutu bisa menjadi organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar merupakan iklim kerjasama yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi sumber daya manusia agar mereka memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab secara kolektif terhadap keseluruhan kinerja organisasi.²⁶

Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupaun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Dari deskripsi di atas dapatlah dipahami bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan dalam upaya mengubah tingkah laku anak didik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa seoptimal mungkin sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.²⁷

b. Komponen Mutu Pendidikan

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah *pertama*, kesiapan dan motivasi siswa. *Kedua*, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. *Ketiga*, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya. *Keempat*, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. *Kelima*, partisipasi masyarakat

²⁶ Hardianto. *Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Lembaga Pendidikan Islam, Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016), 170.

²⁷ Siti Aminah et.al. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada MTsN Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2 (Mei, 2015), 5.

(orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi) dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah.

Manajemen mutu pendidikan difokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan. Komponennya adalah:

- 1) Mutu lulusan sebagai hasil pendidikan; adalah lulusan yang memiliki prestasi akademis dan non akademis. Misalnya: hasil ujian negara atau cabang olah raga.
- 2) Mutu isi dan proses; isi adalah fokus pada kurikulum dan proses adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa dan konten.
- 3) Mutu pendidikan dan tenaga pendidikan; rasio antara guru dengan siswa sesuai dan guru yang memiliki kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikasi guru,
- 4) Mutu sarana dan prasarana; sarana yang memadai dan mutakhir yang senantiasa didaya gunakan untuk mendukung pembelajaran.
- 5) Mutu pengelolaan; terletak pada manajemen sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien yang diarahkan secara konstruktif pada pembentukan kemampuan siswa.
- 6) Mutu pembiayaan; bahwa mutu adalah *cost*, aktivitas yang dilakukan memerlukan biaya, maka biaya untuk mutu harus dirancang sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- 7) Mutu penilaian; evaluasi yang terus menerus dilakukan untuk menilai program sekolah dan pembelajaran sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan bagi pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan.²⁸

c. Pendekatan Mutu Pendidikan

Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu:

²⁸ Engkoswara. *Administrasin Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 313-314

1) Perbaiki secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Konsep ini senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan.²⁹

2) Menentukan standar mutu (*quality assurance*).

Paham ini digunakan untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran, dan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.

Selain itu, pihak manajemen juga harus menentukan standar mutu materi kurikulum dan standar evaluasi yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencapai standar kemampuan dasar. Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, dalam arti bahwa pihak manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sesuai, yaitu yang menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar kemampuan dasar. Pembelajaran yang dimaksud sekurang-kurangnya

²⁹ Marus Suti. *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan*. Jurnal MEDTEK, 2 (Oktober, 2011)

memenuhi karakteristik; menggunakan pendekatan pembelajaran pelajar aktif (*student active learning*), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan pembelajaran tuntas (*master learning*).

3) Perubahan kultur (*change of culture*).

Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin, staf, guru, siswa, dan berbagai unsur terkait, seperti pemimpin yayasan, orang tua, dan para pengguna lulusan pendidikan akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran, baik mutu hasil maupun proses pembelajaran.³⁰

4) Perubahan organisasi (*upsidedown organization*).

Jika visi dan misi, sertatujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja struktur organisasi dan pengawasan dalam organisasi. Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan, tugas-tugas dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan struktur konvensional.

Jika dalam struktur konvensional berturut-turut dari atas ke bawah; senior manager, middle manager, teacher dan support staff; sedangkan struktur

³⁰ *ibid*

yang baru, berupa struktur organisasi layanan dari atas kebawah berturut-turut; learner, team, teacher and support, staff, dan leader.

5) Mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the costumer*).

Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah yang dikembangkan dalam unit public relations. Berbagai informasi antara organisasi pendidikan dan pelanggan harus terus-menerus dipertukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan atau improvisasi yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Maka, pelanggan baik internal maupun eksternal harus dapat terpusatkan melalui interval kreatif pimpinan institusi pendidikan.³¹

a) *Indicator* atau kriteria yang dapat menjadi tolak ukur mutu pendidikan meliputi:

- (1) Hasil Akhir pendidikan
- (2) Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya, tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
- (3) Proses pendidikan.
- (4) Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa).
- (5) Raw input dan lingkungan.³²

³¹ *Ibid*

³² Sri Minarti. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 335

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah- istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³³

Menurut Sutrisno Hadi Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁴ Melihat rumusan masalah diatas, maka penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis, gambar dan berupa angka, yang mana diperoleh dari orang dan perilaku yang diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁵

jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus yakni suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.³⁶

Dalam penelitian kasus, akan dilakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisisnya secara intensif interaksi faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Ciri-ciri penelitian kasus diantaranya adalah:³⁷

³³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

³⁴ Suharsimi Arikuntu. *Prosedur Penelitian dan Praktik*. (Jakarta: Bina Aksara. 2010), 115

³⁵ LexyJ.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007), 6

³⁶ Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016), 10

³⁷ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 18.

1. Menggambarkan subyek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku itu sendiri dan hal-hal yang terkait di dalamnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.
2. Dilakukan dengan mencermati kasus secara mendalam dan berhati-hati
3. Dilakukan karena cenderung didorong untuk keperluan pemecahan masalah.
4. Menekankan pendekatan logitudinal atau pendekatan genetika, yang menunjukkan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Jadi pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin meneliti pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat atau instrumen pengumpul data utama.³⁸ Manusia sebagai instrumen kunci yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya manusia yang mampu memahami kenyataan-kenyataan di lapangan.³⁹

Peneliti sebagai instrumen kunci harus menetapkan fokus penelitian, memilih informan yang tepat sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menguji keabsahan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya. Peneliti akan terjun ke lapangan secara langsung, untuk melakukan proses wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis dan membuat kesimpulan. Pada proses pengambilan data ini, peneliti kualitatif harus berusaha berinteraksi dengan subjek secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara yang tidak memaksa, karena kehadiran seorang peneliti jangan sampai merubah tindakan dan cara para subjek penelitian.⁴⁰

³⁸ Kusumastuti dan Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, 9

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

⁴⁰ Ibid,

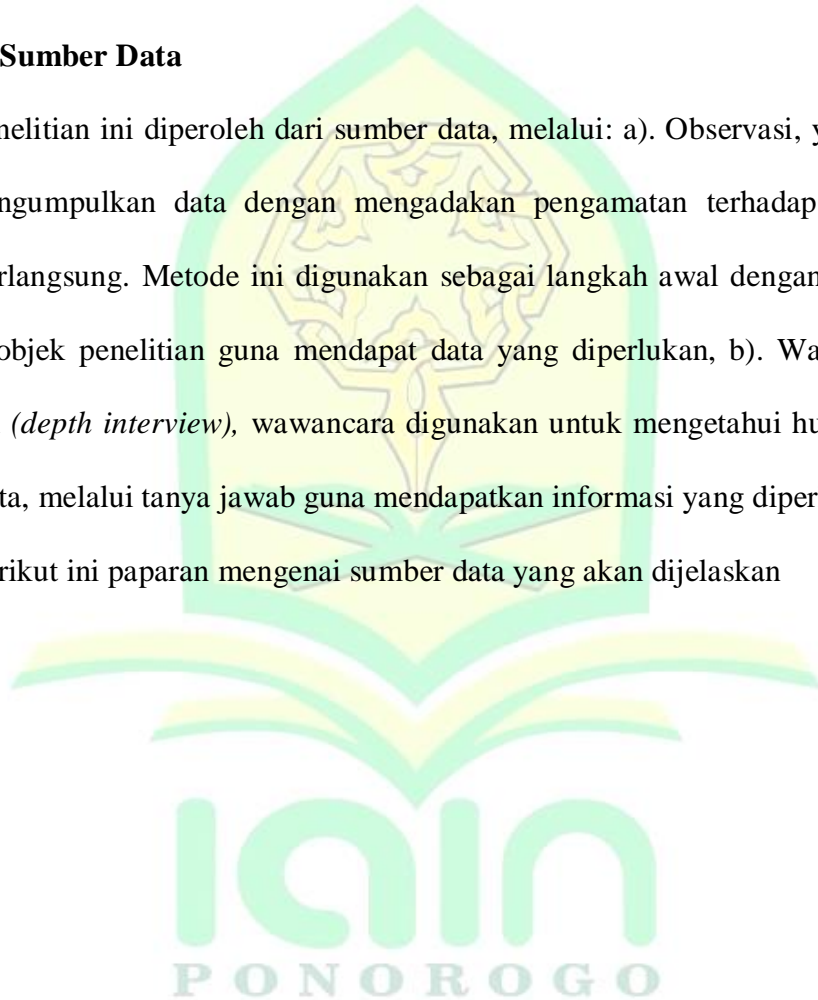
C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Sawoo yang berada di Kecamatan Sawoo tepatnya di Jl. Route Jendral Sudirman No. 121 A Desa Prayungan Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena SMP N 1 Sawoo karena kepala sekolah memiliki banyak strategi dalam meningkatkan peserta didik sehingga SMP N 1 Sawoo memiliki banyak peminat utamanya di Sawoo.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari sumber data, melalui: a). Observasi, yakni suatu seni untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapat data yang diperlukan, b). Wawancara secara mendalam (*depth interview*), wawancara digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

Berikut ini paparan mengenai sumber data yang akan dijelaskan



1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴¹ Sumber data primer dari penelitian ini di peroleh dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha di SMP N 1 Sawoo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian.⁴² Sumber data yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data tentang sekolah dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian, seperti dokumen-dokumen SMP N 1 Sawoo yang berkaitan dengan penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, pada penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data yang meliputi *interview*, *observasi*, serta *dokumentasi*. Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan juga berupaya mengadakan analisis kualitatif tentang kebijakan pengelolaan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo tersebut, karenanya peneliti memerlukan prosedur pengumpulan data tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan.

Secara rinci penjelasan mengenai beberapa prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. *Prosedur Interview*. Wawancara awal dilakukan secara terstruktur dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi secara detail dan mendalam mengenai pandangan responden tentang analisis kebijakan pengelolaan anggaran dalam

⁴¹ Saefudin Anwar. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Pustaka Belajar.2011), 91

⁴² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2008),88

meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo. Wawancara ini dilakukan kepada kepala bagian tata usaha. Wawancara juga digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran besar anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan dana lain yang di dapat sekolah. Untuk itulah maka peneliti perlu menyusun suatu pedoman pada saat melakukan wawancara guna memperoleh data atau informasi yang dimaksud.

- b. *Prosedur observasi*. Observasi atau pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu berupa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo, Prosedur ini dimaksudkan untuk melengkapi prosedur pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan studi dokumentasi.
- c. *Prosedur dokumentasi*. Menurut **Arikunto**, dokumentasi didefinisikan sebagai “Setiap bahan tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.”.⁴³ Tentunya dalam hal ini adalah catatan tertulis yang sering digunakan untuk memperoleh data dokumen tentang kebijakan pengelolaan anggaran di SMP N 1 Sawoo tersebut.



⁴³ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 197

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengetahui dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.⁴⁴

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengumpulan data yang dilakukan peneliti lebih menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang bagaimana langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo beserta implementasi dan implikasi tersebut. Data yang dikumpulkan adalah bentuk dari penelitian yang telah dilakukan jadi, metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai bagaimana bentuk berjalannya “Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo”. Dengan ini peneliti akan melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan dalam lingkup pendidikan dengan jalan mendeskripsikan data yang berkenaan dengan masalah yang terjadi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini banyak dipengaruhi oleh pendapat peneliti, hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, maka

⁴⁴ Dr. Ulber Silalahi, MA. *Metode penelitian sosial*, (Bandung: 2012)

dibutuhkan adanya pemeriksaan keabsahan data dengan harapan untuk mengurangi kesalahan pada data yang ditemukan dan dikumpulkan, sehingga data yang diperoleh benar-benar bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Selanjutnya, dalam proses menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan.⁴⁵

- a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
- b. Membatasi kekeliruan (*biases*) peneliti.
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari 'kebudayaan', dapat menguji ketidak benaraan informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subjek. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Selain itu juga, perpanjangan keikutsertaan juga

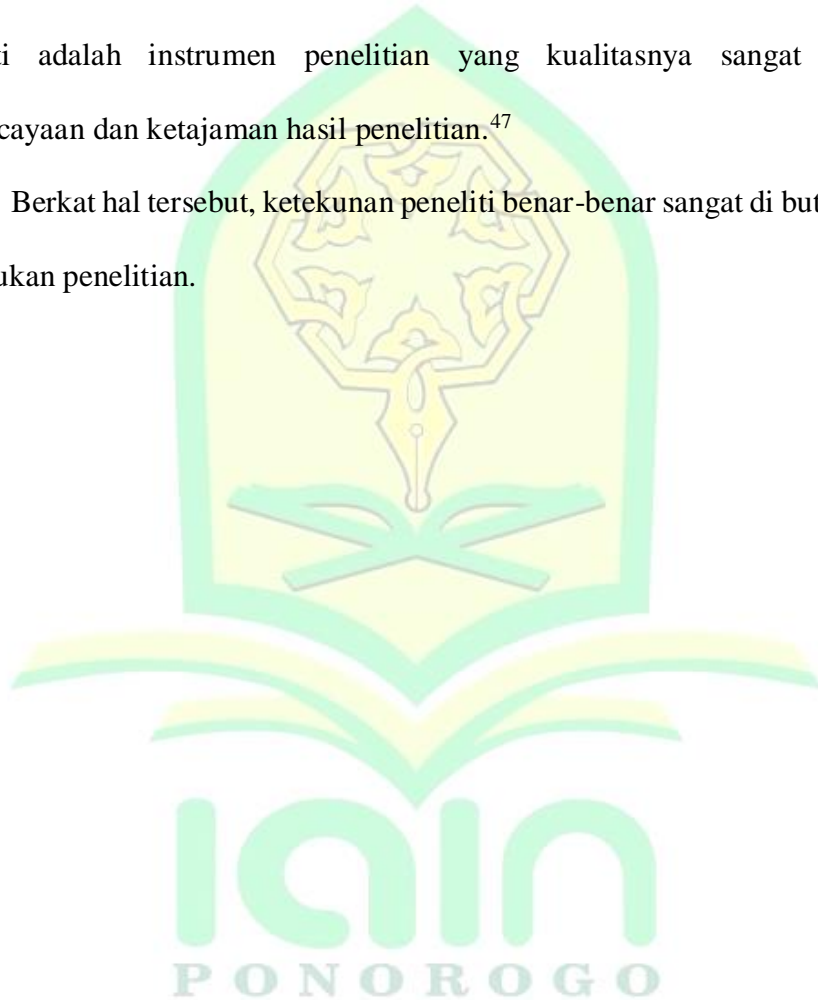
⁴⁵ J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 327.

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri.⁴⁶

2. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat, merupakan langkah untuk menemukan data yang sebenar-benarnya terjadi dengan berusaha mendapatkan pemahaman situasi yang akan dikaji dan yang relevan dengan permasalahan. Pada penggunaan metode kualitatif ini, peneliti adalah instrumen penelitian yang kualitasnya sangat mempengaruhi kepercayaan dan ketajaman hasil penelitian.⁴⁷

Berkat hal tersebut, ketekunan peneliti benar-benar sangat di butuhkan pada saat melakukan penelitian.



⁴⁶ J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

⁴⁷ Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 115.

3. Trigulasi

Teknik ini merupakan sebuah teknik pemeriksaan mengenai keabsahan data dengan memanfaatkan perkara yang lain di luar data tersebut. Hal tersebut untuk keperluan pengecekan ataupun perbandingan terhadap data yang dibahas.⁴⁸

Adapun beberapa penjelasan teknik triangulasi yang peneliti ambil sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Langkah ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.⁴⁹ Diantaranya yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi Teori

Triangulasi ini dapat ditempuh melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian.⁵⁰ Caranya yakni dengan melaporkan hasil penelitian dengan penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam triangulasi teori, untuk meningkatkan kepercayaan.

⁴⁸ Ibid, 115.

⁴⁹ Ibid, 116.

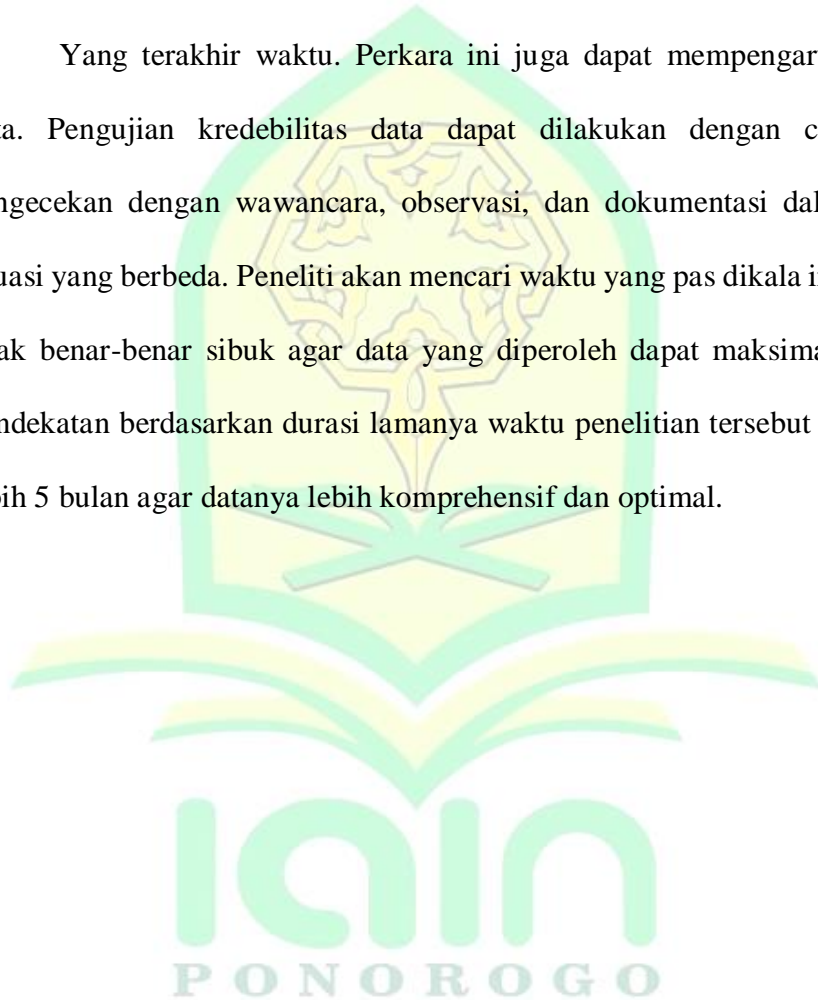
⁵⁰ Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 117.

c. Triangulasi Teknik

Langkah ini ditempuh dengan menggali data yang sejenis dengan metode pengumpulan data yang berbeda.⁵¹ Prakteknya peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan dalam satu waktu.

d. Triangulasi Waktu

Yang terakhir waktu. Perkara ini juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti akan mencari waktu yang pas dikala informan sedang tidak benar-benar sibuk agar data yang diperoleh dapat maksimal dan kredibel. Pendekatan berdasarkan durasi lamanya waktu penelitian tersebut berkisar kurang lebih 5 bulan agar datanya lebih komprehensif dan optimal.



⁵¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 222-223

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah SMP N 1 Sawoo⁵²

SMP N 1 Sawoo merupakan sekolah menengah pertama yang berdiri pada tahun 1981. Karena pada saat itu SMP N 1 Sawoo belum memiliki lahan dan gedung sendiri maka menumpang di SD. Awalnya sekolah ini berdiri gabung dengan SMP N 2 Ponorogo dengan sebutan SMP N 2 Ponorogo yang terletak di Sawoo dan dengan kepala sekolah SMP N 2 Ponorogo yaitu Soimun Subagyo. Pada saat itu semua guru-gurunya SKnya SMP N 2 Ponorogo tapi mengajarnya di Sawoo. Setelah satu tahun tepatnya pada tahun 1982 sekolah ini dibangun gedung oleh pemerintah dengan lahan disediakan masyarakat, setelah unit kerjanya jelas guru-guru itu dipindahkan di SMP N 1 Sawoo.

Maka dari ini yang semula sekolah ini cabang dari SMP N 2 Ponorogo diganti menjadi SMP N 1 Sawoo yang mana SMP Negeri yang pertama kali berdiri di Sawoo. Kepala Sekolah SMP N 1 Sawoo yang pertama adalah guru dari SMP N 2 Ponorogo yaitu J. Sumarno yang diminta untuk mengelola SMP N 1 Sawoo dan dijadikan kepala sekolah SMP N 1 Sawoo. Awalnya SMP N 1 Sawoo dengan awal muridnya sejumlah 3 kelas dan merupakan sekolah tipe C yang memiliki 9 jumlah ruang di mana masing-masing kelas maksimal 48.

⁵² Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/26-VI/2022.

2. Latar Geografis SMP N 1 Sawoo⁵³

Nama Sekolah	: SMP Negeri 1 Sawoo
Alamat Jalan	: Jend. Sudirman No. 121 A
Desa/Kelurahan	: Prayungan, Kec. Sawoo
Kab/Kota	: Ponorogo
No. Telp.	: (0352) 311014
Nama Yayasan (bagi swasta)	: -
Alamat Yayasan & No. Telp.	: -
NSS/NSM/NDS	: 201051114001
Jenjang Akreditasi	: A
Tahun Didirikan	: 1981
Tahun Beroperasi	: 1982
Kepemilikan Tanah	: -
Status Tanah	: SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/ Hibah*)
Luas Tanah	: 15.000 M2
Kepemilikan Tanah Kelas Jauh	
Status Tanah	: -
Luas Tanah	: -
Status Bangunan milik	: Pemerintah
Luas Seluruh bangunan	: 2.078 m2
Nomor Rekening Sekolah (Rutin)	: Bank Jatim No. Rek. 0202050743

⁵³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 02/D/17-VI/2022.

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMP N 1 Sawoo⁵⁴

a. Visi SMP N 1 Sawoo

Berprestasi, terampil, berkepribadian, budaya lingkungan dan berbasis IPTEK berdasarkan iman dan takwa.

b. Misi SMP N 1 Sawoo

- 1) Mengembangkan perangkat kurikulum yang relevan berdiversifikasi
- 2) Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, inovatif, dan menyenangkan
- 3) Meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik
- 4) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
- 5) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif
- 6) Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kebersihan sekolah
- 7) Mewujudkan manajemen sekolah yang prospektif
- 8) Mewujudkan tersedianya sumber dana yang memadai
- 9) Mewujudkan pengembangan kepribadian, keimanan dan ketakwaan

c. Tujuan SMPN 1 Sawoo

SMP Negeri 1 Sawoo Ponorogo perlu merumuskan tujuan pendidikan yang mengacu kepada tujuan umum pendidikan menengah yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan tingkat menengah ini secara nyata diimplementasikan dalam tujuan pendidikan jangka panjang dan jangka pendek SMP Negeri 1 Sawoo yang mengacu pada visi, dan misi sekolah. Rencana Jangka pendek tertuang dalam RKT.

⁵⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/17-VI/2022.

Tujuan Pendidikan SMP Negeri 1 Sawoo Ponorogo TAHUN AJARAN 2020/2021.

Di TAHUN AJARAN 2020/2021 SMP Negeri 1 Sawoo Ponorogo akan mencapai tujuan antara lain:

- 1) Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki iman dan taqwa yang tinggi.
- 2) Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang menjunjung nilai-nilai agama.
- 3) Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan.
- 4) Sekolah mampu menghasilkan peserta didik yang melestarikan kebudayaan nasional.
- 5) Sekolah memiliki peserta didik yang mampu melestarikan lingkungan.
- 6) Sekolah memiliki peserta didik yang mampu mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 7) Sekolah memiliki budaya hidup bersih dan sehat
- 8) Sekolah memiliki lingkungan yang nyaman, bersih, rindang dan asri.
- 9) Sekolah memiliki prestasi lomba akademik di tingkat provinsi.
- 10) Sekolah memiliki prestasi lomba nonakademik di tingkat provinsi.
- 11) Sekolah memiliki peserta didik yang berbudi pekerti luhur.
- 12) Sekolah memiliki lingkungan yang bebas narkoba
- 13) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif.
- 14) Pemanfaatan IT dan multimedia dengan penuh tanggung jawab.
- 15) Mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, unik, kreatif, informatif, demokratis inovatif dan produktif.
- 16) Meraih Standar Ketuntasan Belajar 85 % dan KBM 70.

- 17) Terciptanya sekolah yang berbudaya lingkungan yang sesuai dengan 7K (keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kenyamanan dan kerindangan).
- 18) Sekolah mampu memenuhi 8 standar nasional pendidikan
- 19) Terbentuknya budaya karakter religius, disiplin, anti korupsi.



4. Struktur Organisasi SMP N 1 Sawoo⁵⁵

Di dalam pelaksanaannya suatu lembaga pendidikan memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab secara efektif dalam mencapai suatu visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sekolah.

Adapun struktur organisasi SMP N 1 Sawoo sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah : Sutrisno, M.Pd.
- b. Kepala Tata Usaha : Sugito, S.Pd.
- c. Waka Kurikulum : Dra. Siti Marpuah, S.Pd.
- d. Waka Kesiswaan : Purwoko, S.Pd.
- e. Waka Humas : Mismun, S.Pd.
- f. Waka Sarpras : Moh. Yusron, S.Ag.

5. Keadaan Guru dan Siswa SMP N 1 Sawoo⁵⁶

Pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia di sekolah yang menunjang proses pembelajaran, dan salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh guru dan karyawan SMP N 1 Sawoo sudah sesuai standar pendidikan yang dibutuhkan. Untuk tenaga pendidik di SMP N 1 Sawoo yang sudah bersertifikasi S1 sebanyak 21 orang, bersertifikasi S2 sebanyak 3 orang, dan yang belum bersertifikasi sebanyak 4 orang.

Jumlah sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik di SMP N 1 Sawoo sebanyak 28 orang yang terdiri dari 27 orang tenaga pendidik yang memiliki tugas mengajar sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing.

Untuk jumlah siswa di SMP N 1 Sawoo sebanyak 1290. Dengan perincian sebagai berikut

⁵⁵ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 04/D/17-VI/2022.

⁵⁶ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 05/D/17-VI/2022.

Tabel 4. 1 Keadaan Peserta Didik

Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah Kelas (VII+VIII+IX)	
Jumlah Peserta didik	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta didik	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta didik	Jumlah Rombel	Peserta didik	Rombel
135	5	134	5	123	4	392	14
175	6	129	5	131	4	435	15
167	6	169	6	127	4	463	16

6. Sarana dan Prasarana SMP N 1 Sawoo⁵⁷

Sarana prasarana merupakan fasilitas yang disediakan sekolah untuk menunjang keberlangsungan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana prasarana merupakan faktor pendukung proses berlangsungnya pendidikan.

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana

No.	Jenis prasarana	Ketersediaan			Keterangan	
		Ada dengan kondisi baik	Ada dengan kondisi Rusak	Tidak Ada	Jumlah	SK/TSK
1.	Ruang kelas	1 7	3	-	-	-
2.	Ruang perpustakaan	-	1	-	-	-
3.	Ruang laboratorium IPA	1	-	-	-	-
4.	Ruang pimpinan	-	1	-	-	-
5.	Ruang guru	1	-	-	-	-
6.	Ruang Tenaga Administrasi	-	1	-	-	-
7.	Tempat beribadah	1	-	-	-	-
8.	Ruang konseling	-	-	√	-	-
9.	Ruang UKS	-	-	√	-	-
10.	Ruang organisasi kepeserta didikan	-	1	-	-	-
11.	Jamban	8	8	-	-	-
12.	Gudang	-	2	-	-	-

⁵⁷ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 06/D/17-VI/2022.

No.	Jenis prasarana	Ketersediaan			Keterangan	
		Ada dengan kondisi baik	Ada dengan kondisi Rusak	Tidak Ada	Jumlah	SK/TSK
13.	Ruang sirkulasi	-	-	√	-	-
14.	Tempat bermain/berolahraga	-	1	-	-	-
15.	Kantin	-	2	-	-	-

7. Prestasi SMP N 1 Sawoo⁵⁸

Prestasi peserta didik merupakan hasil yang di capai peserta didik dalam mengikuti perlombaan. Berdasarkan data yang diperoleh SMP N 1 Sawoo sudah banyak mendapatkan kejuaraan baik bidang akademik maupun non-akademik.

Tabel 4. 6 Prestasi Peserta didik SMP N 1 Sawoo Tahun 2018

No	Nama Peserta didik	Jenis Prestasi	Juara	Penyelenggara	Tahun	Tingkat	Ket.
1.	Leaneancy A.	Try Out Smazam Competition	Juara 2	SMAN 1 Sambit	2018	SMP/MTs. Se-Eks Karisidenan Madiun	
2	Pega Septi Cahyani	OlympiadeBiologi	Juara 2	SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo	2018	SMP/MTs. Se-Eks Karisidenan Madiun	
3	Anisa Elfarian Yeni	Olymbasick 2018 Rayon D	Juara 3	SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo	2018	SMP/MTs. Se-Eks Karisidenan Madiun	
4	Leaneancy	OlympiadeBiologi	Juara 2	SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo	2018	SMP/MTs. Se-Eks Karisidenan Madiun	

⁵⁸ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 07/D/17-VI/2022.

5	Leaneancy & April	Olymbasick 2018 Rayon D	Harapan 3	SMAN 2 Ponorogo	2018	Kabupaten	
6	Akbar Muhammad Aulia	Soscien Nation	Juara 3	SMAN 1 Ponorogo	2018	Kabupaten	

Tabel 4. 7 Prestasi Peserta didik SMP N 1 Sawoo Tahun 2019

No	Nama Peserta didik	Jenis Prestasi	Juara	Penyelenggara	Tahun	Tingkat	Ket.
1	Yoga Ferdiansya	Lomba Matematika	Juara 3	SMAN 2 Ponorogo	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
		Lomba Matematika	Juara 1	SMAN 1 Ponorogo	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
		Lomba Matematika	Juara 2	SMA MUHIPO	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
		Lomba Matematika	Juara Hrp 2	MAN 2 Ponorogo	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
2	Novi Ayu Sekar Sari	Lomba IPS	Juara Hrp 2	MAN 2 Ponorogo	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
3	Jovanza	Lomba Bahasa Inggris	Juara 2	SMA MUHIPO	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
4	Rindiani	Lomba IPS	Juara 3 (D)	SMA MUHIPO	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
		Lomba IPS	Juara 3 Umum	SMA MUHIPO	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
5	Meita Trinengsih	Lomba Fisika	Juara 2	SMA MUHIPO	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
6	Iqbal Rizki Suahya	Lomba Biologi	Juara 3	SMA MUHIPO	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks
7	Alfina Prinata	Lomba News Reading	Juara 2	SMAN 1 Sambit	2019	SMP/MTs. Se-Eks Karisidenan Madiun	
8	Risti Widyastuti	Lomba News Reading	Juara 3	SMAN 1 Sambit	2019	SMP/MTs. Se-Eks Karisidenan Madiun	
9	Yoga Ferdiansya	Try Out	Juara 2	SMAN 1 Sambit	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se-Eks

10	Navi Ardiani	Lomba Lari	Juara 3	SMAN 1 Sambit	2019	SMP/MTs. Karisidenan Madiun	Se- Eks	
11	Moh Alfado	Lomba Lari 100 m Putra	Juara 3	Dinas pendidikan Kabupaten Ponoorogo	2019	Kabupaten		
12	Ara Ayuning Tyas	Lomba Lompat Jauh Putri	Juara 2	Dinas pendidikan Kabupaten Ponoorogo	2019	Kabupaten		

B. Paparan Data

1. Langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

Langkah-langkah penting dalam pengelolaan anggaran adalah perencanaan dalam sistem pendidikan. Hal ini melibatkan keterlibatan kepala sekolah yang berperan aktif dalam mengendalikan, mengembangkan serta menjalankan sekolah yang dipimpinnya. Dalam mengendalikan, mengembangkan serta menjalankan sekolahnya tentu kepala sekolah harus mempunyai dan menerapkan perencanaan yang tepat sehingga tercapainya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya kepala sekolah SMP N 1 Sawoo membuat kebijakan pengelolaan anggaran yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan suatu lembaga pendidikan dipegang penuh oleh pemimpin sekolah itu sendiri. Karena pemimpin adalah penegak dan penentu arah yang akan menentukan tujuan sekolah yang akan dicapai. Kebijakan ini tentunya bertujuan untuk pengembangan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam perencanaan pembuatan Kebijakan pengelolaan anggaran tersebut mengikutsertakan semua tenaga pendidik dan kependidikan untuk berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan anggaran harus memperhatikan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah terlebih dalam perencanaan, penggunaan anggaran, pemantauan hasil program, dan evaluasi.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan bapak Sutrisno M.Pd, selaku kepala SMP

N 1 Sawoo saat wawancara sebagai berikut:

Bentuk langkah-langkah dalam menjalankan kebijakan, anggaran dan pengelolaan di SMP N 1 Sawoo ini, jelas dilakukan semua dengan mengikuti peraturan pemerintah. Bapak sebagai kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap pengelolaan anggaran di sekolah ini, sebelum dana masuk maka bapak mengumpulkan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu, di mana merencanakan semua untuk saat ini apa yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, dengan adanya perencanaan atau rancangan maka terulah dilaksanakan membuat program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, pelaksanaan ini tidak cukup hanya dilakukan beberapa orang akan tetapi harus membentuk sebuah kelompok untuk menyelesaikan sebuah program di sekolah, adapun program yang dilakukan sudah terlaksana maka bapak melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan di sekolah dan melihat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Adapun dana yang masuk seperti dana BOS, dan dana sukarela dari wali murid. maka dari itu dana ini sangat membutuhkan pembukuan yang sesuai pengalokasian dananya untuk menghindari sebuah permasalahan dan penyalahgunaan dana yang masuk ke sekolah.⁵⁹

Hasil dari wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Tata Usaha yaitu bapak Sugito S. Pd.

Sebagai berikut:

Sebelum melakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran terlebih dahulu bapak dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini melakukan perancangan tentang kegiatan yang paling utama untuk dilaksanakan agar sekolah mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Dan dalam pelaksanaan evaluasi setiap 3 bulan sekali bapak melakukan evaluasi dan menanyakan kepada semua pembina bagaimana perkembangan dana-dana yang di alokasikan apakah sudah terpakai sesuai dengan kegiatan masing-masing seperti pramuka, PMR, OSIS dan ekstra kurikuler lainnya.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk indikator yang pertama yaitu kepala sekolah telah membuat dan menjelaskan langkah-langkah dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. sebagai kepala sekolah yang bertanggung

⁵⁹ Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/19-VI/2022

⁶⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/17-VI/2022

jawab atas semua jalannya rancangan perencanaan dan pengelolaan anggaran kepala sekolah juga harus memantau pengalokasian dana supaya dana yang di keluarkan tepat sasaran karna menghindari permasalahan dan penyalahgunaan dana untuk sekolah. Indikator yang kedua yaitu diadakan evaluasi di setiap 3 bulan sekali untuk memantau bagaimana perkembangan dan hambatan selama proses berjalan.

Selain membuat perencanaan dan pengelolaan, kepala sekolah juga membuat atau membentuk program sehingga mutu pendidikan dapat meningkat dan memiliki progres di setiap tahun nya yang merupakan suatu usaha yang dilakukan demi kemajuan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sutrisno M. Pd, selaku kepala sekolah SMP N 1 Sawoo sebagai berikut:

Ada beberapa program yaitu seperti: melakukan tes pada siswa baru, pembangunan pagar, rehab ruangan, rehab lapangan, rehab perpustakaan, pembangunan taman disekitar lapangan, rehab kantor guru dan kamar mandi khusus siswa dan guru, pembuatan aula atau gedung serba guna, pelatihan guru dan pegawai, pengadaan barang inventaris, ATK, alat lab, alat olahraga, kesenian, dan alat kesehatan. Dari semua program yang disebutkan dapat peneliti lihat untuk saat ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum sesuai yang diinginkan.⁶¹

Hasil dari pernyataan tersebut, banyak hal yang harus ditangani dalam ranah lingkungan sekolah yang sangat perlu dijadikan perhatian tentang pembangunan sekolah demi peningkatan mutu pendidikan. Lancar atau tidaknya suatu sekolah dan tinggi rendahnya mutu pendidikan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah saja akan tetapi, semua stakeholder atau sumber daya manusia yang ada di dalam nya juga berperan besar, tetapi lebih banyak ditentukan oleh cara kepala sekolah menjalankan masa kepemimpinannya disekolah. Salah satunya upaya yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu memberikan sarana prasarana yang layak dan nyaman bagi siswa-siswa disekolah. Sebab jika sarana

⁶¹ Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/19-VI/2022

prasarana tidak layak atau kurang nyaman maka mutu pendidikan tidak akan meningkat segala potensi yang di miliki siswa akan terhambat karna kurang memadai nya sarana prasarana di sekolah sehingga yang dimiliki dapat didaya gunakan yang bermutu sesuai target SMP N 1 Sawoo.

Berdasarkan paparan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo, yaitu:

- a. Kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu di SMP N 1 Sawoo yaitu mengikuti kebijakan yang di buat oleh pemerintah
- b. Membuat jalannya rancangan perencanaan dan pengelolaan anggaran dan melakukan evaluasi.
- c. Memberikan sarana prasarana pendidikan yang nyaman bagi siswa

2. Implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan SMP N 1 Sawoo.

Dalam ranah lingkup pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan untuk terus memegang peran aktif dalam mengembangkan dan menjalankan sekolah yang dipimpinnya dengan beberapa rancangan rencana yang digunakan oleh kepala sekolah. Dengan penerapan kebijakan anggaran yang tepat dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi sekolah. Maka dari itu kepala sekolah diharuskan menggunakan penerapan pengelolaan anggaran yang sesuai dibutuhkan sekolah.

Melalui penerapan kebijakan pengelolaan anggaran yang terarah seperti di SMP N 1 Sawoo, sekolah ini sudah perlahan memenuhi peningkatan mutu pendidikan. Dan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo bisa meningkat dengan di dukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan dan kependidikan yang berkualitas

membuat sekolah ini bisa menyaingi sekolah setara nya. SMP N 1 Sawoo juga mempunyai beberapa prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dengan adanya kelebihan dan prestasi yang mampu diraih sekolah, hal ini yang nantinya dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang diterapkan kepala sekolah SMP N 1 Sawoo.

Adapun langkah strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo yaitu, cenderung ke arah perbaikan atau kualitas, tenaga pendidik, kependidikan siswa dan sarana prasarana sekolah. Dalam hal ini kualitas perbaikan yang dilakukan oleh kepala sekolah selalu mengarahkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara oleh kepala sekolah SMP N 1 Sawoo yaitu Bapak Sutrisno M.Pd, beliau mengatakan:

Realisasinya begini.untuk tingkat keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini sudah dapat dikategorikan meningkat karena dari ke hari banyak yang di dapatkan oleh siswa/i yaitu ikut lomba dari cabang olahraga dan organisasi kesenian yang dapat mengharumkan nama baik sekolah karena siswa/i yang ada disekolah ini lebih menyukai kegiatan ekstrakurikuler.⁶²

Kemudian, selanjutnya implementasi dalam pelaksanaan program sekolah dalam strategi pengembangan mutu pendidikan yaitu membuat program yang berkualitas bersifat membangun dalam lingkup sekolah baik tenaga pendidik, kependidikan dan siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kepala sekolah SMP N 1 Sawoo melakukan sebuah rancangan RKS untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, adapun kegiatan yang dilakukan seperti, melakukan pelatihan kepada guru yang ada disekolah, melengkapi fasilitas

⁶² Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/19-VI/2022

sekolah, dan memenuhi kebutuhan belajar mengajar guru dan siswa.⁶³ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara dengan kepala Tata Usaha yaitu bapak Sugito S. Pd. Sebagai berikut:

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo sejauh ini program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, yaitu salah satunya dalam program ekstrakurikuler, dan program-program lainnya yang dapat meningkatkan minat bakat siswa dalam bidang ekstrakurikuler, dari segi akademik anak-anak yang ada di sekolah ini kurang aktif dalam belajar akan tetapi lebih menonjol ke bidang olahraga dan bidang organisasi kesenian.⁶⁴

Suksesnya keberlangsungan penerapan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo tersebut tentu ada beberapa faktor pendukungnya. Menurut kepala sekolah SMP N 1 Sawoo, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam menjalankan program sekolah yaitu faktor dari dalam sekolah itu sendiri. Seperti penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan pengalokasian terlihat dari bukti-bukti tersebut dalam penggunaan anggaran yang sudah di berikan oleh pemerintah kepada sekolah sangat jelas akan tetapi dana yang masuk masih belum mencukupi dalam sebuah program yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara dengan kepala sekolah yaitu bapak Sutrisno M. Pd. Sebagai berikut:

Terlihat dari program-program untuk pembangunan gedung-gedung disekolah yang mulai merata, sistem program belajar mengajar dan sarana prasarana yang mendukung untuk kenyamanan tenaga pendidik, kependidikan dan siswa dalam belajar mengajar disekolah ini. Nantinya akan membantu semua tenaga pendidik, kependidikan dan siswa untuk terus mengembangkan dan menciptakan motivasi model pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah memadai.⁶⁵

Yang menjadikan faktor pendukung terhadap keberlangsungan terealisasinya dalam pelaksanaan program-program yang telah dijelaskan yaitu kebersamaan anggota yang ada di SMP N 1 Sawoo yang berupa tenaga pendidik dan kependidikan serta

⁶³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 09/D/05-VI/2022.

⁶⁴ Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/17-VI/2022

⁶⁵ Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/19-VI/2022

semua peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan program sekolah tidak semuanya berjalan dengan baik, walaupun sudah adanya faktor pendukung. Dalam pelaksanaan dan penerapan terkadang masih menemukan kendala-kendala. Kendala tersebut yaitu bersifat internal yang berasal dari RKAS yang masih kurang dalam menunjang untuk peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara dengan kepala Tata Usaha yaitu bapak Sugito S. Pd. Sebagai berikut:

Jadi begini, RKAS yang di buat di sekolah ini dalam jangka waktu pertahun sekali yaitu di buat pada akhir tahun ajaran, karena di akhir tahun penutupan dan penyerahan buku. Untuk dana yang belum mencukupi sekolah menggali dana lewat Komite berupa sumbangan sukarela bagi yang mampu, dana tersebut digunakan sebagai pendamping BOS. Selain sumbangan sukarela untuk peningkatan mutu, komite juga menggali dana sumbangan sukarela untuk fisik dana sarana lain yang diperlukan sekolah melalui Komite.⁶⁷

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan yang menjadi kendala dalam menjalankan program-program dari kepala sekolah yaitu terbatasnya dana bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan perencanaan. Di samping keberhasilan semua program dan dampak yang signifikan bagi sekolah. Kepala sekolah tentu harus melakukan upaya dengan memantau dan juga melakukan evaluasi. Semua itu bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang di hadapi dan perkiraan seberapa jauh hambatan yang diatasi tujuan yang akan dicapai. Kepala sekolah SMP N 1 Sawoo dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi selalu berupaya untuk melakukan evaluasi setiap akhir bulan pembelajaran. Untuk memantau keadaan sekolah kepala sekolah selalu terjun kelapangan walaupun sesibuk apapun untuk memantau secara langsung semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program-program perbaikan dan perkembangan yang berkaitan dengan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

⁶⁶ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 10/D/05-VI/2022

⁶⁷ Lihat Transkrip wawancara nomor 02/W/17-VI/2022

Berdasarkan paparan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo yaitu melakukan penerapan yang sudah di buat dalam perencanaan untuk membangun proses peningkatkan mutu pendidikan dalam hal input maupun output, melengkapi sarna prasarana yang masih kurang memadai dan menjalankan keberlangsungan program yang bersifat sama sama membangun antara tenaga pendidik, kependidikan dan siswa terakhir melakukan evaluasi untuk terus memantau progres keberhasilan.

3. Implikasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

Mendiskusikan tentang dampak atau implikasi dari penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pasti selalu terdapat perubahan yang bersifat signifikan. Dampak tersebut tidak hanya di rasakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan saja. akan tetapi, sangat berdampak juga terhadap seluruh siswa. Dampak dari implikasi terlihat dari hasilnya dan manfaat jangka panjang. Kepala sekolah membuat perencanaan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara oleh kepala sekolah SMP N 1 Sawoo yaitu Bapak Sutrisno M.Pd, beliau mengatakan:

Upaya dari peningkatan mutu pendidikan khususnya memiliki dampak dari beberapa bagian yaitu output dan outcome. Dampak dari output yaitu ada pada bagian tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini setelah di buatnya program kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu ini secara umum banyak sekali perubahan yaitu tertatanya pembagiaan anggaran berupa menerapkan program yang bersifat membangun sekolah tersebut. Mulai dari segi pembangunan, sarana prsarana, dan kelengkaapa sekolah untuk menunjang siswa dalam belajar dan kegiatan ekstrakurikuler.⁶⁸

⁶⁸ Lihat Transkrip wawancara nomor 01/W/19-VI/2022

Dari sini bentuk implikasi dari kepala sekolah yaitu membuat RKT tidak hanya di lihat dari output nya saja namun dilihat juga dari implikasi yang dihasilkan dengan baik dan berjalan sesuai dengan tatanan atau bahkan aturan atau kebijakan yang sekolah ikuti sesuai dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah. Dari implikasi pelaksanaan program RKT atau strategi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah juga terlihat dari segi outcome nya (manfaat/jangka panjang). Outcome disini bisa dilihat dari semua komponen dan bagian yang berada di SMP N 1 Sawoo. Disini maksudnya yaitu seluruh tenaga oendidik dan kependidikan dan siswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan keberhasilan peningkatan mutu di sekolah.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara oleh kepala sekolah SMP N 1 Sawoo yaitu Bapak Sutrisno M.Pd, beliau mengatakan:

Disini terlihat dari bagian outcome nya yaitu berdampak pada seluruh warga yang ada di sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian penting dari bagian inti sekolah sumber daya manusia pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan pendidikan baik dari segi pembelajaran maupun dari segi ekstrakurikuler atau kegiatan di luar pembelajara. Memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu bagaimana agar siswa bisa nyaman dalam belajar mengajar dan memhami pelajaran yang disampaikan atau menyalurkan minat bakat baik dari segi organisasi maupun ekstrakurikuler lainnya.⁷⁰

Dari penjelasan tersebut bisa di lihat bahwa implikasi memiliki dampak dari pelaksanaan program kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu terlihat dari output dan outcome nya suah sangat baik. Pentingnya kebijakan yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap pengelolaan anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, sehingga nantinya dengan bermutunya pendidikan banyak yang berminat untuk masuk ke sekolah tersebut dan pastinya jika banyak siswa/i yang masuk

⁶⁹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 11/D/26-VI/2022.

⁷⁰ Lihat Transkrip wawancara nomor 01/W/19-VI/2022

ke sekolah tersebut akan dapat mempertahankan kualitas mutu pendidikan. Faktor yang menentukan keberhasilan dari implikasi yaitu dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sehat dan nyaman.

Dari semua kebijakan yang di lakukan oleh kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo ini sangat membawa perubahan yang cukup signifikan pada SMP N 1 Sawoo. Salah satunya menjadi sekolah menengah pertama yang unggul dengan kemajuan mutu pendidikannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara dengan kepala Tata Usaha yaitu bapak Sugito S. Pd. Sebagai berikut:

Perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan selain yang sudah saya jelaskan di atas yaitu menjadikan sekolah unggul dalam ekstrakurikuler keseniannya yang sudah banyak meraih penghargaan lomba di tingkat kabupaten. Walaupun sekolah ini di lingkup kecamatan tetapi tidak menjadi penghalang untuk terus bisa bersaing dengan sekolah yang lain.⁷¹

Dari paparan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi dari program pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dilakukan oleh kepala sekolah, dampak tersebut dibagi menjadi dua yaitu output dan outcome. Jika output meliputi tenaga pendidik dan kependidikan dan siswa. Sedangkan outcome yaitu secara umum keseluruhan meliputi warga sekolah mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

C. Pembahasan

1. Langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

⁷¹ Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/17-VI/2022

Langkah awal yang dilakukan lembaga pendidikan dalam melaksanakan langkah-langkah kebijakan menurut peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah.⁷² Langkah-langkah kebijakan pengelolaan anggaran, program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).

Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengelolaan dana pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan pengelolaan dana pendidikan

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan Pendidikan di SMP N 1 Sawoo. Ada dua bagian dalam penganggaran yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penggunaan pendapatan anggaran harus dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat di realisasikan, dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran ada tiga cara pandang yaitu *pertama*, penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap bagian anggaran dalam setiap tahun. *Kedua*, penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus maupun umum. Anggaran ini di analisis antara dana pelaksanaan dengan rencana berdasarkan analisa anggaran berbasis nol. *Ketiga*, penganggaran dalam bentuk gabungan unsur anggaran.

b. Proses penyusunan anggaran

⁷² PERMENPAN No./04/M.PAN/4/2007

Proses penyusunan anggaran disusun melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) meliputi (1) sumber pendapatan, (2) pengeluaran, misalnya untuk kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran dan honor serta kesejahteraan.

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini ada 4 bagian kegiatan yaitu:

- 1) Merencanakan anggaran, kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisa dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran serta dirumuskan dengan jelas, melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang tersedia.
- 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan administrasi, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
- 4) Menilai pelaksanaan anggaran, menilai proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

c. Proses pengaturan anggaran

- 1) Penerimaan, bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat
- 2) Penggunaan,
- 3) Pertanggungjawaban anggaran

Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh tata usaha (TU). Tata usaha keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang tata usaha keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar yang dikerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah. Langkah-langkah tersebut antara lain: adanya perencanaan, sumber daya manusia yang jujur, loyal, berkualitas dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya. Selain itu ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan yaitu: konsep penganggaran pendidikan pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran dana pendidikan.

- d. Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP 1 N Sawoo.

Pelaksanaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah melewati proses perencanaan secara teratur dan terarah guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan SMP N 1 Sawoo.

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik.⁷³

Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka

⁷³Rian Nugroho. *Kebijakan Pendidikan yang unggul*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 115.

mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya.⁷⁴

Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus. Menurut George C. Edward III, mengemukakan empat variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif, yakni komunikasi (*comunication*), sumber daya (*resources*), disposition atau sikap (*attitudes*), serta struktur birokrasi (*berreycratic structure*). Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi adalah faktor komunikasi. Karena menurut George C. Edward III komunikasi ini sangatlah memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu tujuan dari diterapkannya suatu kebijaka tersebut. Ada 3 hal yang mempengaruhi proses, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi yakni: 1). Tranmisi, 2. Kejelasan, 3) Konsistensi. Misscommunication atau salah pengertian dalam penyaluran komunikasi itu sering terjadi, maka dari itu penyaluran

⁷⁴Abuddin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), 219.

komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Mengenai kejelasan Para pelaksana kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau membingungkan atau mendua, karena jika komunikasinya tidak jelas pesan kebijakan akan menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, ketidakjelasan pesan kebijakan tak melulu menghalangi implementasi, karena para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Tetapi pada tataran tertentu lainnya ketidakjelasan komunikasi ini menyebabkan penyelewengan tujuan yang hendak diraih oleh penetapan kebijakan Dan Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan.

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar yaitu:

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya personal yang meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa,telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban

menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang-tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah

3. Implikasi penerapan kebijakan pengelolaan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo.

Penerapan kebijakan pengelolaan anggaran merupakan rangkaian aktivitas pengaturan keuangan sekolah mulai perencanaan, pembukuuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Pengelolaan anggaran di sekolah adalah serangkaian aktivitas atau pekerjaan dalam mengelola anggaran yang sudah ada sehingga segala kebutuhan di sekolah tersebut dapat terpenuhi. Dalam melakukan pengelolaan anggaran di sekolah, kepala sekolah juga bendaharawan sekolah dituntut untuk mengatur keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya, sehingga segala komponen di suatu sekolah dapat terlaksana dan terwujud, sehingga tercapai proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.⁷⁵

Anggaran di sekolah merupakan bagian yang sangat penting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Penyelenggaraan anggaran meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun itu.

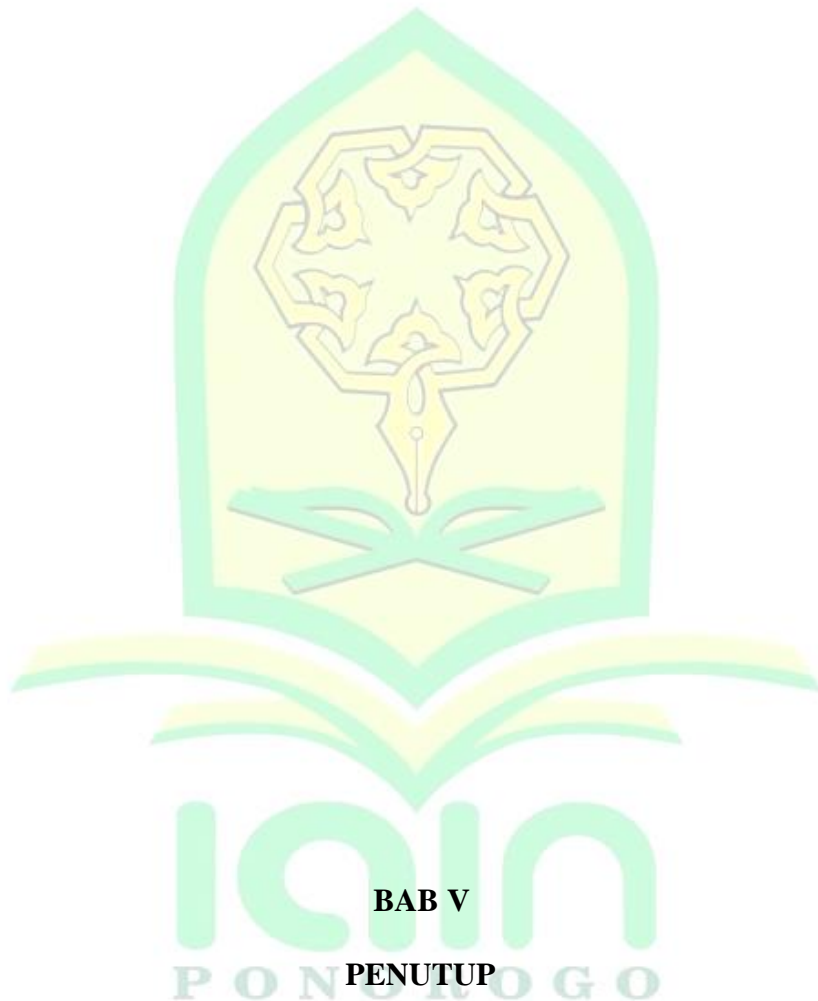
⁷⁵ Karna Husni. *Manajemen Perubahan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 277.

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah *pertama*, kesiapan dan motivasi siswa. *Kedua*, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. *Ketiga*, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya. *Keempat*, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. *Kelima*, partisipasi masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi) dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah.

Manajemen mutu pendidikan difokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan. Komponennya adalah:

- 1) Mutu lulusan sebagai hasil pendidikan; adalah lulusan yang memiliki prestasi akademis dan non akademis. Misalnya: hasil ujian negara atau cabang olah raga.
- 2) Mutu isi dan proses; isi adalah fokus pada kurikulum dan proses adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa dan konten.
- 3) Mutu pendidikan dan tenaga pendidikan; rasio antara guru dengan siswa sesuai dan guru yang memiliki kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikasi guru,
- 4) Mutu sarana dan prasarana; sarana yang memadai dan mutakhir yang senantiasa didaya gunakan untuk mendukung pembelajaran.
- 5) Mutu pengelolaan; terletak pada manajemen sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien yang diarahkan secara konstruktif pada pembentukan kemampuan siswa.
- 6) Mutu pembiayaan; bahwa mutu adalah *cost*, aktivitas yang dilakukan memerlukan biaya, maka biaya untuk mutu harus dirancang sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

- 7) Mutu penilaian; evaluasi yang terus menerus dilakukan untuk menilai program sekolah dan pembelajaran sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan bagi pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan.⁷⁶



i. Kesimpulan

1. Langkah-Langkah Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo

⁷⁶ Engkoswara. *Administrasin Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 313-314

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis terhadap kebijakan pengelolaan anggaran yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai landasan penelitian. Data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran yang diterapkan di SMP N 1 Sawoo memiliki dampak positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan anggaran adalah perencanaan anggaran yang terarah, pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP N 1 Sawoo

Perencanaan anggaran yang baik merupakan pondasi penting dalam pengelolaan sumber daya keuangan di sekolah. Dengan melakukan perencanaan yang cermat, alokasi anggaran dapat dilakukan dengan tepat, memastikan dana digunakan secara efisien pada program-program yang berdampak positif pada mutu pendidikan. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel membuka kesempatan untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap penggunaan dana, serta mendorong pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. Partisipasi aktif dari kepala sekolah, pengelola keuangan, guru, dan orang tua murid juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan anggaran. Dengan melibatkan semua pihak terkait, dapat tercipta lingkungan yang inklusif dan kolaboratif, di mana kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan bersama.

3. Implikasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Peningkatan Mutu

Pendidikan di SMP N 1 Sawoo

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan anggaran, seperti kurangnya partisipasi dari sebagian pihak terkait dan kekurangan transparansi dalam alokasi anggaran. Oleh karena itu, perbaikan terus-menerus dan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran sangat dianjurkan, dengan fokus pada memperkuat partisipasi dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang kebijakan pengelolaan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo. Temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Studi lanjutan dapat melibatkan sampel yang lebih luas atau menggali aspek-aspek lain yang relevan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

ii. Saran

1. Bagi Lembaga

Evaluasilah strategi pengelolaan anggaran yang diterapkan di SMP N 1 Sawoo untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Libatkan stakeholder dalam proses evaluasi ini guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan strategi yang telah digunakan. Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh, lembaga dapat mengadopsi perbaikan dan pengembangan strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik.

2. Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dorong tenaga pendidik dan kependidikan di SMP N 1 Sawoo untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi mereka terkait pengelolaan anggaran.

Fokus pada pengembangan pemahaman mereka tentang perencanaan anggaran, transparansi penggunaan dana, dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Dengan meningkatkan keterampilan ini, mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan. Saran ini diharapkan dapat memberikan arah dan panduan dalam pengembangan strategi pengelolaan anggaran serta peningkatan keterampilan dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan di SMP N 1 Sawoo.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari strategi pengelolaan anggaran yang telah diterapkan di SMP N 1 Sawoo. Melalui analisis data historis dan pemantauan perkembangan mutu pendidikan, peneliti dapat mengidentifikasi apakah strategi pengelolaan anggaran tersebut telah memberikan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Serta mereka dapat melibatkan beberapa sekolah lain dalam studi komparatif terkait pengelolaan anggaran dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan membandingkan strategi dan kebijakan yang diterapkan di berbagai sekolah, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan rekomendasi yang dapat diterapkan di SMP N 1 Sawoo atau sekolah-sekolah lainnya. Dengan menggali lebih dalam pada saran-saran ini, peneliti selanjutnya dapat melanjutkan dan memperkaya penelitian mengenai pengelolaan anggaran dan peningkatan mutu pendidikan di SMP N 1 Sawoo serta memberikan sumbangan yang berharga bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hafidah. *Kebijakan Pengelolaan Budgeting Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar*. Aceh: Skripsi. 2018.
- Aminah et.al, Siti. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada MTSN Kota Lhokseumawe*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 2 Mei, 2015.
- Amtu, Onisimus. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah konsep, strategi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta,2013.

- Anthony, R., Vijay Govindarajan. *Management Control System, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.
- Anwar, Saefudin. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Arikuntu, Suharsimi. *Prosedur Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara. 2010.
- Costa, Vincent P. *Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas, 2000.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.
- Engkoswara. *Administrasin Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fakarotul Karimah. *Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Thafidz Ash-Habul Khafi Ngawi)*. Ngawi: Tesis. 2018.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Handayani, Dwi. *Analisis Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah Se-Surakarta*. Surakarta: Skripsi. 2017.
- Hansen dan Mowen. *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. Salemba Empat: Jakarta. 2004.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hardianto. *Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Lembaga Pendidikan Islam, Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2. Juli-Desember, 2016.
- <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos>. daiakses pada 23 November 2021 pukul 13.00 WIB.
- Karna Husni. *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia,2015.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Marus Suti. *Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan. Jurnal MEDTEK*, 2 Oktober, 2011.
- Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulayasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2003.
- _____, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyasa. *Manajemen dan Kepempimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Munandar. *Budgeting,Edisi Pertama,Cetakan Ke- 14*. Yogyakarta: BPFE. 2000.

- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nugroho, Rian. *Kebijakan Pendidikan yang unggul*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- _____, *Public Polic*. Jakarta: PT Elex Media Computido, 2008.
- Sahertian, Piet A. Mutaher, Frans. *Prinsip dan Tehnik supervisi Pendidikan*. Jakarta reneka cipta,1981.
- Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-2, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Penerbitan STIE YKPN. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Supriyono, R.A. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan, Edisi 2 Buku 2*. Yogyakarta: BPFE. 1990.
- Tilaar dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Zamroni. *Meningkatkan Mutu Sekolah*. Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2007.
- Zazin, Nur. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

